

# SIKAP POLITIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN NEGARA PADA PEMILU 2014\*

Ade Hikmatul Fauziah<sup>1</sup>

Permalink: <https://www.academia.edu/15117505>

**Abstract:** *Unity Development Party in Succession of National Leadership in 2014's Election.* Unity Development Party has a strategic role in canalizing the inspiration and the interest of Muslim people and nation as a whole, especially in ensuring that the Act promulgated will not against Islamic values. To win the 2014's election, the Party has launched the strategic champagne "go back to its khittah", and also to struggle to realize the democratic nation. In Addition, the Unity Development Party also highlighted the importance to adhere Islamic values in national level embodied in Five Principle of the State (Pancasila)

**Key Words:** 2014's Election, Unity Development Party, Succession of National leadership

**Abstrak:** *Partai Persatuan Pembangunan Dalam Sukseksi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.* Partai Persatuan Pembangunan memiliki peran membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam. Untuk memenangkan pemilu 2014, PPP memiliki strategi mengedepankan isu bahwa PPP telah kembali ke fitrah dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis. Bagi PPP pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang ditegakkan, tetapi mengandung nilai perspektif bagi peran PPP guna menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**Kata Kunci:** Pemilu 2014, PPP, Sukseksi Kepemimpinan Negara

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 30 Maret 2015, direvisi: 02 April 2015, disetujui untuk terbit: 15 April 2015.

<sup>1</sup> Pemerhati Partai Politik Islam Indonesia dan alumnus Program Studi Jinayah Siyasa. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangsel. Email:

## Pendahuluan

Lengsernya Soeharto sebagai 'icon' Orde Baru menandai lahirnya Era Reformasi, yang tentunya telah melambungkan harapan masyarakat bahwa bangsa Indonesia akan segera meninggalkan kekelaman politik yang berkepanjangan dan memasuki era baru yang dilandasi oleh semangat demokratisasi.<sup>2</sup> Hal ini dapat membuka kesempatan bagi berlangsungnya reformasi demokratis di Indonesia. Untuk memenuhi aspirasi rakyat yang digemakan oleh gerakan reformasi, perubahan-perubahan mendasar harus ditegakkan, termasuk perubahan menyeluruh pada semua pranata politik, sosial, ekonomi, dan perubahan pada basis hubungan antara rakyat dan negara.

Perubahan-perubahan semacam ini hanya dapat diwujudkan melalui penyusunan satu agenda reformasi yang menyeluruh, sebagai hasil dari proses dialog yang terbuka, inklusif dan partisipatif. Keruntuhan rezim Orde Baru pada pertengahan tahun 1998 merupakan babak baru dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia yaitu berakhirnya era otoriter dan lahirnya era demokratisasi.<sup>3</sup>

Peluang semakin besar di Era Reformasi khususnya di bidang politik, yang diwujudkan dengan lahirnya banyak partai politik Islam. Sebelumnya di zaman Orde Baru partai Islam telah habis setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan asas pancasila dan menghilangkan asas Islam dalam muktamarnya yang pertama tahun 1984.<sup>4</sup>

Meskipun bertahun-tahun menjadi penurut terhadap rezim Orde Baru, partai PPP berhasil mempertahankan hidup hingga ke masa reformasi dengan keluarnya sebagai partai yang memiliki suara terbanyak keempat dan jumlah kursi ketiga terbesar pada pemilu 1999. Keuntungan PPP adalah namanya yang sudah dikenal dengan pemilih yang terbiasa memilih PPP, sebuah organisasi nasional, dan legitimasi reformasi karena posisinya sebagai partai oposisi paling dinamis di akhir zaman Orde Baru.<sup>5</sup>

Dalam bahan-bahan kampanye pemilu 1999, PPP menekankan sifat moderatnya. Mereka mengatakan mendukung reformasi, namun ketua partai Hamzah Haz pada saat itu menyakinkan, ia tidaklah fanatik

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik: Pasca Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), h. 282

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 13

<sup>4</sup> Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru: Perubahan Politik Dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), Cet.1, h. ii

<sup>5</sup> Panduan Parlemen Indonesia (Jakarta: Yayasan API, 2001), h. 128

dalam pendekatan kepada Islam. Contoh, ia tidak mendukung implementasi hukum syariah Islam, namun dengan prinsip-prinsip Islam.

Seiringan dengan berjalannya waktu pemilu 2014 telah berlangsung. Sebelumnya partai-partai politik telah mempersiapkan diri untuk bersaing. Survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia tentang nasib dan masa depan partai Islam menarik untuk dicermati. Popularitas dan elektabilitas mereka berada di bawah partai politik yang berhaluan nasionalis. Hasil survei tersebut menjadi peringatan bagi partai Islam untuk berbenah, survei-survei yang dilansir belakangan ini masih menempatkan partai-partai Islam di bawah partai nasionalis. Sebagaimana diketahui, survei LSI itu dilakukan pada 1-8 Oktober 2012, melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi, dengan tingkat kesalahan sekitar 2,9 persen. Dari bukti-bukti empiris, memang menjadi trend penurunan perolehan suara partai Islam. Pada pemilu pertama tahun 1955 partai Islam menjadi kampion di Indonesia dengan perolehan suara sebesar 43,7 persen, kemudian menurun pada pemilu tahun 1999 menjadi 35,95 persen, naik sedikit menjadi 37,74 persen pada pemilu tahun 2004, pemilu 2009 kembali menurun menjadi 28,62 persen, dan pemilu 2014 partai Islam kembali meraih suara 31,41 persen.<sup>6</sup>

Dalam sistem demokratis, pergantian kekuasaan suksesi ditentukan melalui cara yang demokratis, berupa pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan ajang pertarungan bagi parpol-parpol dalam menempatkan kader-kader yang terbaik untuk dapat menempati kursi di lembaga legislasi. Hal ini tentunya dapat terealisasi apabila masyarakat percaya ikut memberikan suaranya untuk memberi mandat kepada kader partai yang akan duduk di lembaga perwakilan tersebut.<sup>7</sup>

Adanya pergantian kepemimpinan dalam suatu negara, maka dikenal istilah suksesi. Singkatnya suksesi adalah penggantian kepemimpinan dari suatu negara. Suksesi menjadi hal yang mutlak dalam sebuah organisasi. Dewasa ini suksesi hanyalah dimaknai sebagai ajang perebutan kekuasaan saja. Akan tetapi, dibalik itu tersirat makna akan kehadiran setitik sinar yang dapat membawa pada benderangnya lautan gulita. Langkah dan sikap yang bijak diperlukan dengan tujuan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Elektabilitas Partai Dan Kompatibilitas Demokrasi*. 2013. Diakses Tanggal 26 Agustus 2014 Dari [Http://M.Kompasiana.Com/Post/Read/529097/2/Elektabilitas-Partai-Islam-Dan-Kompatibilitas-Demokrasi.Html](http://M.Kompasiana.Com/Post/Read/529097/2/Elektabilitas-Partai-Islam-Dan-Kompatibilitas-Demokrasi.Html)

<sup>7</sup> Ahmad Budiman, *Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, Dalam Sali, Ed., Susiana, Pemilu 2004 : Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi* (Jakarta: Tiga Putera Utama, 2003), h. 57

## Ade Hikmatul Fauziah

mengkonstruksi organisasi yang lebih baik. Egoisitas hendaknya dikesampingkan demi kepentingan bersama, terkhusus dalam setiap suksesi di sebuah organisasi dan lembaga manapun agar tercipta kebersamaan, dan kedamaian yang dinantikan oleh khalayak dalam kelompok atau organisasi tersebut.<sup>8</sup>

Suksesi presiden tahun 2014 menjadi sangat penting ketika bangsa ini memasuki era baru. Indonesia terus menjalani proses konsolidasi demokrasi, yaitu membangun demokrasi yang kokoh dan menyelesaikan sejumlah masalah dalam beragam bidang kehidupan. Suksesi menjadi sangat penting karena transisional dari era lama (era baru hingga reformasi) menuju era yang benar-benar baru dengan generasi yang terlepas dari beban masa lalu. Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menciptakan kader pemimpin nasional, menjadi tugas partai politik mencari pemimpin baru yang bisa memimpin Indonesia di Era Baru.<sup>9</sup>

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan penelitian ilmiah dengan judul; Sikap Politik Partai Persatuan Pembangunan Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara Pada Pemilu 2014.

### ***Partai Politik Islam Pada Era Orde Lama (1945-1965)***

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kelahiran partai politik di Indonesia diawali dengan keluarnya Maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945, yang memuat “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun, sebelumnya dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.”<sup>1</sup>

Sejalan dengan pembentukan partai-partai politik, terjadi perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). KNIP yang sebelumnya berfungsi sebagai dewan penasihat pemerintah berubah menjadi dewan yang mempunyai kekuasaan legislatif. Selanjutnya melalui badan pekerja KNIP diajukan usul kepada Presiden agar mempertimbangkan perubahan sistem pemerintahan Presidential

---

<sup>8</sup> Artikel Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2014 Pukul 23.00 Wib Dari [Http://Andreysubiantoro.Viviti.Com/Entries/Rekiblik/Suksesi-Kepemimpinan](http://Andreysubiantoro.Viviti.Com/Entries/Rekiblik/Suksesi-Kepemimpinan)

<sup>9</sup>Artikel Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2014 Pukul 16.15 Wib Dari [Http://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/08/26/0833212/Pentingnya\\_Suksesi\\_2014](http://Nasional.Kompas.Com/Read/2013/08/26/0833212/Pentingnya_Suksesi_2014)

<sup>1</sup> Wilopo, *Zaman Pemerintahan Parai-Partai Dan Kelemahañ-Kelamahannya*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1976), h.8

menurut UUD 1945 menjadi sistem pertanggungjawaban Menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat (pada waktu itu adalah Badan Pekerja KNIP). Melalui Maklumat pemerintahan tanggal 14 November 1945, Presiden menyatakan persetujuannya atas usul tersebut, sambil mengumumkan susunan kabinet Syahrir yang pertama.<sup>1</sup>

Kelahiran partai yang didorong oleh kebutuhan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, membuat proses terbentuknya partai tidak melalui tahap-tahap tertentu yang dapat mematangkan dirinya. Hal ini akan berimplikasi pada kualitas pemimpin partai dalam wawasan politiknya, yang mungkin lebih berorientasi pada nilai primordial daripada ideologi nasional. Keadaan politik seperti yang disebutkan diatas, dapat ditemui pada partai Masyumi. Sekalipun Masyumi berlandaskan pada ideologi Islam bahkan dapat dikatakan sudah menghimpun seluruh aspirasi kelompok Islam di Indonesia.<sup>1</sup>

Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 tersebut, kelompok Islam mampu memenangkan kompetisi dibandingkan aliran politik lainnya dengan klasifikasi suara aliran Islam sebesar 45,2%, aliran Nasionalis 27,6%, aliran sosialis 17,2% serta sisanya dibagi antara golongan Kristen dan partai-partai kecil lainnya yang beraliran Nasionalis maupun Marxis. Secara lebih spesifik, pemilu 1955 mengantarkan Masyumi menduduki urutan kedua setelah PNI dengan memperoleh 57 kursi di parlemen, sedangkan NU memperoleh 45 kursi di parlemen.<sup>1</sup>

Keutuhan Masyumi sebagai partai politik umat Islam tidak berlangsung lama, perbedaan kultur dan tahap perkembangan masing-masing unsur pendukungnya jauh lebih berperan daripada memperjuangkan kepentingan partai. Masyumi akhirnya mengalami keretakan karena terjadi perebutan kekuasaan di dalam partai. Dengan alasannya sendiri, pemimpin unsur membawa pengikutnya keluar untuk membangun partai baru atau mengubah sifat organisasinya menjadi politik tersendiri. PSII keluar karena ajakan Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet diluar Masyumi. NU megubah dirinya menjadi partai

---

<sup>1</sup> A. Dahlan Ranuwihardjo, *Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi Beberapa Catatan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1979), h.17

<sup>1</sup> Satu-satunya partai politik Islam yang berada di luar Masyumi adalah Perti yang didirikan pada tanggal 30 November 1945, karena ia lahir dan berkembang di Sumatera Barat, maka pengaruhnya tidak begitu besar. [Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya*, (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1983), h.221].

<sup>1</sup> Sumarno, *Megawati Dan Aspirasi Politik Islam*, dalam Ruđi Muhtar Dkk, *Megawati Soekarno Putri: Presiden Republik Indonesia*, (Jakarta: Rumpun Dian Nugraha, 2002), h.64

politik, setelah mengenal kursi Menteri Agama.<sup>1</sup>

### ***Partai Politik Islam Pada Era Orde Baru (1967-1998)***

Ketika Orde Baru berkuasa, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali, yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu di bawah Orde Baru memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya.<sup>1</sup>

Pemilu pertama pada masa Orde Baru diadakan pada tahun 1971, selama kampanye pemilu, para pemimpin Islam tetap mengingatkan sesama muslim bahwa suatu kewajiban secara agama untuk memberikan suara kepada partai Islam. Usaha itu tidak berlangsung secara efektif ketika diadakan pemungutan suara partai Islam hanya mampu memperoleh 20,44% suara atau 94 kursi dari 460 kursi yang diperebutkan di DPR.

Partai Islam terdiri dari Perti, NU, Permusi, dan lain sebagainya menyatakan berfusi menjadi satu partai yang diberi nama dengan Partai Persatuan Pembangunan pada bulan Januari tahun 1973, dengan menggunakan Islam sebagai asas dan Ka'bah sebagai lambangnya. Dengan harapan bahwa partai ini terdapat di hati pemilih Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Setelah pemilu 1971 secara berkala pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan kalender lima tahun penyelenggaraan pemilu, walaupun pemilu kedua terjadi keterlambatan selama satu tahun yaitu pada 2 Mei 1977, akibat keterlambatan pelantikan anggota MPR hasil pemilu 1971 baru dilantik 1 Oktober 1972. Pada pemilu tahun 1977 partai Islam hanya mampu memperoleh 21,52% atau 99 kursi dari 460 kursi di parlemen, serta pemilu tahun 1982 hanya mampu memperoleh 20,44% dari jumlah suara atau kursi 94 kursi.<sup>1</sup>

Pemilu 1982 dilaksanakan pada 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 360 orang. Pemilu tahun 1982 dengan landasan hukumnya adalah UU No. 2/1980 tentang Pemilu. Sebagaimana dalam UU sebelumnya, sistem pemilu yang digunakan yaitu dengan sistem pemilihan proporsional. Pada pemilu saat itu jumlah penduduk Indonesia adalah 146.532.407 jiwa, dan jumlah pemilih 82.134.195 orang atau 56.05% dan suara sah 75.126.306 orang atau 91.47%.

---

<sup>1</sup> Herbert Feith, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*.

<sup>1</sup> Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Sepuñtar Pemilu 2009*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), Cet. 1, h.15

<sup>1</sup> Bahtiar Effendy, *Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia<sup>6</sup> Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat III*, No. 5 (Agustus 2003), h. 17

## Hasil Pemilu 1982

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi DPR
1	Golkar	48.334.724	242
2	PPP	20.871.800	94
3	PDI	5.919.702	24
	Jumlah	75.126.306	360

Sumber: Biro Humas KPU

Pemilu 1987, yaitu ketika PPP tidak lagi memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya pengembosan oleh tokoh-tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur, dan Jawa Tengah, sehingga terjadinya penurunan suara PPP yang mencerminkan sebagai partai Islam. Akibat berbagai kebijakan yang tidak mengakui hak-hak dan etika dalam berdemokrasi, khususnya etika kepartaian, kekuatan politik umat Islam terbesar pada masa Orde Lama, yaitu dengan hilangnya Masyumi dari peredaran politik. Namun pada waktu pertengahan tahun 80-an sebetulnya ada keinginan dari tokoh-tokoh Masyumi untuk kembali mendirikan sebuah partai. Keinginan mereka itu bisa terlaksana mengingat iklim demokrasi yang tidak mendukung untuk itu keinginan mereka baru terealisasi pada era reformasi.<sup>1</sup>

Kebijakan politik yang menghapus legal formal Islam adalah politik dan lebih menekankan dimensi substansif Islam menandai telah tertutupnya partai Islam untuk hidup dan bersaing dalam dinamika demokrasi di Indonesia serta partai Islam tidak bisa lagi untuk berkompetisi dalam pemilu, sehingga dalam pemilu 1987 PPP hanya mampu memperoleh 12,20% atau 61 kursi dari 500 kursi.

Pemilu 1992 dilaksanakan pada 9 Juni 1992, pemilu ini dilakukan dengan landasan hukum yaitu UU No. 1/1985 tentang Pemilu. Pada pemilu 1992 jumlah penduduk Indonesia mencapai 177.489.747 jiwa, sementara pemilih terdaftar adalah 107.565.569 jiwa atau 60,60%. Pemilu pada saat itu adalah untuk memilih 400 anggota DPR, suara sah nasional pada saat itu ialah 97.789.534 suara atau 90,91%. Hasil pemilu saat itu adalah Golkar memperoleh 66.599.331 suara dan mendapat 282 kursi DPR, PPP memperoleh 16.624.647 suara dan mendapat 62 kursi

<sup>1</sup> Arsekal Salim, *Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama Negara* (Jakarta: Puslit IAIN, 1999), h.12

## **Ade Hikmatul Fauziah**

DPR, PDI memperoleh 14.565.556 suara dan mendapat 56 kursi DPR, dengan hasil keseluruhan 97.789.534 jumlah suara, dan 400 kursi DPR.

Pemilu 1997 diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997. Dengan landasan hukum seperti sebelumnya, yaitu UU No. 1/1985 tentang Pemilu. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional untuk pemilu ini anggota DPR yang dipilih berjumlah 425 orang atau bertambah 25 orang. Hal ini karena pemerintah mengubah UU No. 16/1969 tentang Susunan dan Kedudukan dengan UU No. 5/1995 tentang Susunan dan Kedudukan. Pelaksanaan pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru, misalnya penunjukan pimpinan parpol, seperti tertenggarai dengan jelas dalam konflik internal antara PDI Soerjadi dengan PDI Megawati Soekarno Putri yang memuncak, peristiwa pengambil alihan kantor PDI Jalan Diponegoro tanggal 27 Juli 1997.

Ketika pemilu diselenggarakan penduduk Indonesia berjumlah 196.286.613 jiwa, sedangkan yang terdaftar sebagai pemilih 124.740.987 jiwa atau 63,55%. Suara yang sah tercatat pada pemilu saat itu adalah 112.991.150 atau 90,58%, dan hasil pemilu 1997 adalah Golkar mendapatkan 84.187.907 suara dan 325 kursi DPR, PPP mendapatkan 25.340.018 dan 89 kursi DPR, PDI mendapatkan 3.463.225 dan mendapat 11 kursi DPR. Dengan jumlah keseluruhan 112.991.150 suara dan 425 kursi DPR.

Pemilu 1997 merupakan pemilu terakhir dari masa pemerintahan Orde Baru pemilu ini dilaksanakan pemerintah yang sebenarnya direncanakan untuk memilih anggota DPR, MPR dan DPRD periode 1997-2002.<sup>1</sup>

8

### ***Partai Islam Pada Era Reformasi (1998-2014)***

Jangka waktu adalah zaman Orde Reformasi yang sangat semarak dalam pelaksanaan demokrasi. Pada masa ini telah terjadi pergantian kekuasaan yang cepat yaitu dari Presiden Soeharto ke B.J.Habibie tahun 1998, selanjutnya dari Presiden B.J.Habibie ke Abdurrahman Wahid tahun 1999. Dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri tahun 2001, dan dari Presiden Megawati Soekarno Putri ke Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2014 (2 periode). Selain itu, di Era Reformasi telah terjadi perubahan secara mendasar tentang sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dimasa Presiden Soeharto, Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Musni Umar, *Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan dan Sekuler*, (Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004) Cet. 1, h. 69.



1945 sebagai dasar sakral dan tidak boleh diubah, maka berdasarkan tuntutan gerakan reformasi, MPR sesuai tugasnya yaitu merubah Undang-Undang Dasar 1945 telah melakukan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Salah satu bagian yang paling mendasar yang diubah ialah pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini dipilih langsung oleh rakyat, yang untuk pertama dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Selain itu rakyat telah memilih calon anggota parlemen (DPR), calon anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebanyak empat orang yang mewakili 32 provinsi di Indonesia.<sup>1</sup>

9

Undang-undang kepartaian baru pun digodok dan UU nomor 05 tahun 1985 Tentang Azas Tunggal pun dicabut yang membawa angin segar bagi aktifitas Islam untuk menghidupkan kembali partai Islam, apalagi dalam menyongsong pemilu 1999. Menjelang pemilu tersebut tidak kurang dari 141 partai baru didaftarkan dan sebanyak 48 darinya adalah partai Islam, jumlah tersebut secara kuantitas melebihi partai Islam dalam pemilu 1955. Dari 48, namun dari jumlah tersebut hanya 33 partai yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti verifikasi oleh Departemen Kehakiman dan sisanya tereliminasi dan dari 33 partai tersebut hanya 18 partai yang lolos verifikasi untuk ikut serta dalam pemilihan umum tanggal 7 Juli 1999.<sup>2</sup>

Dari 18 partai tersebut, hanya 9 partai Islam yang memperoleh satu kursi atau lebih diparlemen. Partai yang mendapatkan jatah kursi di DPR tersebut adalah PPP (58 Kursi), PKB (51 Kursi), PBB (13 Kursi), PKS (7 Kursi), PNU (5 kursi), PP (1 Kursi), PSII (1 Kursi), Masyumi (1 kursi), dan PKU (1 kursi).<sup>2</sup>

Pemilu 1999 merupakan pemilu yang dipercepat dari jadwal yang ditetapkan yaitu tahun 2002. Pemilu ini diselenggarakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang menjabat sebagai Presiden pengganti Presiden Soeharto setelah berhenti secara sepihak pada 21 Mei 1998. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie karena ia dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan. Pemilu 1999 tidak lagi diselenggarakan pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam UU No. 3/1999 Tentang Pemilu disebutkan sebelum

---

<sup>1</sup> Musni Umar, *Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan dan Sekuler*, h. 69

<sup>2</sup> Arsekal Salim, *Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara*, h.12

<sup>2</sup> Bahtiar Effendy, *Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia*, h. 45

## Ade Hikmatul Fauziah

KPU terbentuk, lembaga pemilihan umum melaksanakan tugas KPU paling lama tiga puluh hari setelah UU disahkan.<sup>2</sup>

Dari 8 partai Islam itu hanya tiga yang memperoleh suara yang cukup signifikan, yakni PPP, PKB, dan PBB. Partai Amanat Nasional juga meraih suara yang lumayan, tetapi tidak dikategorikan sebagai partai Islam, karena tidak memenuhi kriteria partai Islam. Walaupun partai ini sangat dekat dengan kalangan Islam, karena pada saat itu ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) Prof Dr M. Amien Rais adalah sebagai mantan ketua pimpinan pusat Muhammadiyah.

Meleburnya partai-partai Islam menjadi satu partai politik kelihatannya tidak mungkin terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan partai-partai Islam tidak mungkin menjadi satu. Diantaranya ialah tidak semua orang yang menjadi pimpinan partai Islam memiliki komitmen terhadap kemajuan Islam dan kaum muslimin.

Faktor lain yang menyulitkan penyatuan partai Islam adalah bahwa basis Islam saling berbeda dan tersebar ke dalam berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan lain-lain. Masing-masing organisasi itu memiliki basis dan strategi perjuangan yang berbeda. Mereka memiliki wawasan keagamaan yang berbeda. Seperti NU berpegang teguh kepada paham *Ahlussunnah wal Jamaah*, khususnya mazhab Syafi'i di bidang hukum dan mazhab Asy'ariyah di bidang teologi. Sedang Muhammadiyah memiliki slogan "kembali kepada Alquran dan Hadits" ini berarti Muhammadiyah tidak terikat pada salah satu mazhab, khususnya yang tergolong dalam kelompok *Ahlussunnah wal Jamaah*.

Karena itu kalau partai-partai Islam bisa disatukan boleh jadi umurnya tidak akan panjang, karena perbedaan kepentingan dan aspirasi masing-masing kelompok yang mengakibatkan pertikaian dan berakhir dengan pembubaran sebagai partai politik. Dengan demikian partai-partai Islam kelihatannya tidak perlu dijadikan satu. Yang penting ialah mereka memiliki komitmen yang sama dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi kaum muslimin.

Secara kelembagaan partai Islam terbagi menjadi beberapa bagian partai, tetapi dalam memperjuangkan aspirasi umat mereka bersatu. Hal ini telah dibuktikan dengan membentuk forum silaturahmi partai-partai Islam yang kemudian melahirkan poros tengah. Poros tengah yang lalu menggalang kekuatan bersama Golkar untuk

---

<sup>2</sup> Fernita Darwis *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, h.16.

memperjuangkan Abdurrahman Wahid menjadi Presiden setelah B.J. Habibie megundurkan diri dari pencalonan Presiden dalam sidang umum MPR 1999. Perjuangan poros tengah ternyata berhasil, yang dibuktikan dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia yang keempat.

Dengan begitu penyatuan partai Islam bukanlah satu-satunya cara untuk memperjuangkan aspirasi umat. Tampaknya inilah strategi yang tepat bagi partai-partai Islam dalam menghadapi pemilu 2004 dengan menjalin kerja sama dalam memperjuangkan aspirasi umat.<sup>2</sup>

Pemilu 2004 merupakan pemilu kedua setelah Soeharto jatuh, meskipun demikian, pada pemilu kedua ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam banyak hal pada pemilu 1999. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama setelah amandemen ke-4 UUD 1945. Melalui amandemen struktur politik Indonesia diubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik.

Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan Presiden dan wakil Presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu.<sup>2</sup> Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, akan tetapi sepanjang sejarah pemilihan umum di Indonesia sejak pemilu 1955 sampai dengan Era Reformasi 1999-2014, belum pernah partai-partai politik Islam berhasil memenangkan pemilu legislatif.

Dalam pemilu tahun 2004, PPP merupakan salah satu partai politik Islam terkemuka di Indonesia dengan membuat kejutan dengan mengajukan ketua umum Hamzah Haz sebagai calon Presiden RI periode 2004-2009. Akan tetapi, hasilnya sangat menyedihkan karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Presiden/wakil Presiden 5 Juli 2004, yang diumumkan komisi pemilihan umum (KPU) 26 Juli 2004, Hamzah Haz yang berpasangan dengan Jend. (Purn) Agum Gumelar hanya memperoleh dukungan suara sebesar 3.09% atau 3.569.861, sebelumnya partai PPP berhasil memperoleh dukungan suara sebesar 8,15 % atau 9.248.764.<sup>2</sup>

Pada pemilu demokratis pertama di Era Reformasi pada tahun 1999, gabungan partai lebih tajam terjadi antara partai Islam dengan partai Nasionalis. Partai Islam meraih suara sebesar 35,95%, partai

---

<sup>2</sup> Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, h. 17

<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Fernita Darwis, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, h.18

<sup>2</sup> Musni Umar, *Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan Dan Sekuler*, h. ii

## Ade Hikmatul Fauziah

Nasionalis mendapat suara sebesar 64,05%. Pada pemilu 2004, partai Islam mendapat perolehan suara sebesar 37,74%, sementara partai Nasionalis mendapatkan suara sebesar 62,26%.<sup>2</sup>

Pada pemilu 2009 terjadi banyak perubahan, diantaranya adanya dua threshold. Pertama, *Electoral Threshold* (ET) yaitu syarat untuk dapat ikut serta dalam pemilu sebelumnya sebesar 3% suara. Kedua, diadakan *Parliamentary Threshold* (PT) yaitu syarat partai untuk dapat diikutsertakan dalam penghitungan fungsi yaitu sebesar 2,5%. Partai-partai yang diperoleh suaranya tidak mencapai 2,5% tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.

Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 diselenggarakan untuk memilih Presiden dan wakil residen Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap propinsi yang tersebar dilebih dari 50% jumlah propinsi di Indonesia.

Pada pemilu 2009, gabungan partai Islam mengalami penurunan. Tingkat keterpilihan gabungan partai Islam sebesar 28,62%. Sedangkan gabungan elektabilitas partai Nasionalis mencapai 71,38%. Pemilu 2009 seolah menjadi kuburan bagi partai yang berideologi Islam. Dari enam partai yang berideologi Islam yang ikut serta dalam pemilu (PKS, PPP, PBB, PKNU, PBR, dan PMB), hanya 2 partai yang lolos aturan parliamentary threshold 2,5%, yakni PKS dan PPP.

Pada hasil pemilu tahun 2009 menempatkan dua poros koalisi Megawati dan Prabowo, sementara Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pengikut karena partai yang dipimpinnnya hanya meraih 9,42% perolehan suara mengalami penurunan dari perolehan pada pemilu 2009 yang mencapai 20,81%. Satu poros koalisi lainnya adalah partai Golkar Aburizal Bakrie alias ARB menjadi calon Presiden.

Dengan fenomena politik seperti itu, tiga pemimpin partai Nasionalis (Megawati, Prabowo, Aburizal Bakrie) masing-masing akan memimpin poros koalisi. Adapun partai-partai Islam, kecuali mereka bersatu hanya akan menjadi pengikut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fernita Darwis *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, h. 36

<sup>2</sup> Artikel Diakses Pada Tanggal 1 November 2012, Pukul 20.40 Wib.

Hal ini terlihat lebih jelas pada pilpres 2014 yang baru saja berlangsung. Prabowo yang didukung oleh partai-partai Islam (PPP, PKS, dan PBB) dan bahkan ormas-ormas Islam ternyata mesti menelan kekalahan.

### Sejarah Berdirinya Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdiri dan dideklarasikan di Jakarta, pada 5 Januari 1973, sebagai fusi dari partai-partai politik yang berasaskan Islam. Terdiri dari: Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia dan PERTI. Dengan demikian PPP merupakan wadah perjuangan umat Islam untuk menegakkan demokrasi serta mewujudkan keadilan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Adanya latar belakang perjuangan yang mendorong terjadinya fusi, salah satu faktor di antaranya adalah: dua dari partai Islam yaitu NU dan PSII pernah berada satu wadah dalam Masyumi, partai Islam yang lahir pada tanggal 7 November 1945. Hanya saja dua tahun kemudian tahun 1947 SI keluar dari Masyumi, dan NU mengikuti jejak SI pada tahun 1952.<sup>2</sup>

Namun setelah pemilu 1955, Masyumi, NU, PSII, dan PERTI kembali melakukan kerjasama strategis, kerjasama itu terjadi di dalam Konstituante, ketika sama-sama mendukung Islam sebagai dasar negara. Kerjasama itu (minus Masyumi) terjadi pada pembahasan GBHN dalam sidang istimewa (SI) MPR 1967.<sup>3</sup> Begitu pula dalam menghadapi pemilu 1971, sesuai dengan TAP MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang mengamanatkan perlu penyederhanaan orsospol, maka Presiden Soeharto pada tanggal 17 Februari 1970 menganjurkan agar dalam menghadapi pemilu 1971, orsospol yang ada melakukan pengelompokkan. Pada tanggal 27 Februari 1970 Presiden mengadakan konsultasi dengan pimpinan orsospol mengenai penyederhanaan dan pengelompokkan tersebut. Dalam konsultasi tersebut, Presiden Soeharto menyarankan bahwa disamping Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas bersama yang didasari pada persamaan tekanan pada aspek

---

[Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009](http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2009)

<sup>2</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai Partai Politik Indonesia*. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 1999), h. 161.

<sup>2</sup> Partai Masyumi dengan resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1960, setelah Orde Baru tampil, para tokoh itu ingin merehabilitasinya, tetapi ditolak pemerintah, yang diizinkan pemerintah hanya lahirnya Parmusi untuk menyalurkan aspirasi pendukung Masyumi dulu.

<sup>3</sup> Pemi Apriyanto, *Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa*, h.2

## Ade Hikmatul Fauziah

pembangunan, sehingga terwujudlah tiga kelompok yaitu; “Kelompok Spiritual Material” dan “Kelompok Material Spiritual” dan “Spiritual Material” (Kelompok Karya).<sup>3</sup>

Setelah pemilu 1971, kegiatan untuk memfusikan partai-partai terus berlangsung. Soeharto sendiri berkali-kali mengundang pimpinan partai untuk membicarakan perlunya fusi empat partai Islam itu menjadi partai baru bernafaskan spiritual dan material. Dari kalangan Islam sendiri, prakarsa kearah fusi kemudian dilakukan oleh ketua umum PARMUSI, M.S Mintaredja.<sup>3</sup> Bulan Desember 1972, M.S Mintaredja mengundang pimpinan partai ke Departemen Sosial (Menteri Sosial) saat itu untuk merealisasikan pengangkatan kelompok persatuan pembangunan yang bersifat federatif ke arah yang lebih kokoh. Dalam pertemuan itu, PSII menolak dengan keras adanya fusi, lain halnya dengan PARMUSI dan PERTI mendukung fusi KH. Idham Chalid pada prinsipnya setuju peningkatan kerjasama walau belum bersedia meningkatkannya ke arah fusi.

Setelah lama tertunda, rapat dilakukan bertempat di kediaman KH. Idham Chalid rapat itu dipicu oleh lahirnya DPP PSII tandingan (terhadap kepemimpinan PSII M. CH. Ibrahim) yang setuju fusi, yakni tanggal 5 Januari 1973 atau bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1392 Hijriyah. Isi rapat tersebut adalah sebagai berikut:

“Deklarasi hasil rapat presidium badan pekerja dan pimpinan fraksi kelompok Partai Persatuan Pembangunan. Keempat partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan. Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spiritual dan materil. Untuk merealisasi kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Pesatuan Pembangunan, baik organisator

---

<sup>3</sup> M Dja'far Siddiq, *PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru*, (Jakarta. 2003).

<sup>3</sup> Pemi Apriyanto, *Kader Nasional PPP Dari Masa Ke Masa*, h.4 <sup>2</sup>

maupun politis. Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Februari 1973. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufiq dan hidayahnya. Amin.”<sup>3</sup>

Dari hasil kesepakatan tersebut, maka lahirlah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada intinya merupakan hasil fusi politik dari partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa'dah 1392 Hijriyah. PPP merupakan partai politik penerus estafet empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah melalui perjuangan politik.

Ketua umum DPP PPP yang pertama adalah H. Mohammad Syafaat Mintaredja yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Ketua umum yang kedua adalah H. Jailani Naro yang menjabat dua periode tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam muktamar I, Naro terpilih kembali menjadi ketua umum DPP PPP. Kemudian ketua umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Matareum yang menjabat sejak terpilih dalam muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam muktamar III tahun 1994.<sup>3</sup>

4

Sejak berdirinya, PPP terus berjuang untuk membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam.

Sebelum mendaftar pada lembaga pemilihan umum sebagai peserta pemilu 1999, PPP dalam perjalanannya telah melakukan muktamar sebanyak 4 kali dan pernah melakukan perubahan lambang partai dari gambar Ka'bah (pemilu 1977-1982) menjadi gambar Bintang

---

<sup>3</sup> Ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan, *Tentang Khittah Dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta, 2007), h.6

<sup>3</sup> Artikel Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2015, Pukul 20.30 Wib<sup>4</sup>  
<http://asal-usul-motivasi.blogspot.com/2014/02/asal-usul-sejarah-partai-persatuan.html?m=1>

**Ade Hikmatul Fauziah**

(1987-1997) karena mengacu pada UU No. 3/1987 yang mensyaratkan bagi peserta pemilu harus berasaskan Pancasila. Setelah melaksanakan muktamar IV di Jakarta pada 29 November–Desember 1998, Muktamar mengamanatkan PPP kembali ke asas Islam, maka lambang partai pun menggunakan gambar Ka'bah. Hasil muktamar lainnya, adalah terbentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri: Hamzah Haz (ketua) dan Alimarwan Hanan sebagai Sekretaris Jendral.

Karena berasaskan Islam, maka kelompok masyarakat pendukung utama partai adalah warga Republik Indonesia yang beragama Islam. Serta terbuka untuk semua profesi dan status sosial ekonomi. Basis pendukung PPP meliputi wilayah: Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk memenangkan pemilu, PPP memiliki strategi mengedepankan isu, bahwasannya PPP telah kembali ke fitrahnya dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis.<sup>3</sup>

Ketua umum DPP PPP yang kelima adalah Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dan Irgan Chairul Mahfiz sebagai Sekretaris Jendral. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi ketua umum untuk masa bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP tahun 2011.

Proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader partai untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu menurun. Dalam pemilihan umum 2009, bagi PPP merupakan pemilu kedelapan yang diikuti sejak PPP lahir dipentas politik nasional. PPP meraih 5,5 juta suara atau 5,33%. Dari sisi perolehan kursi, PPP memperoleh 38 kursi dari 550 kursi yang diperebutkan. PPP mengalami penurunan suara 3% dibandingkan pemilihan umum 2004, PPP memperoleh 8,15% dengan perolehan 58 kursi DPR, dan pada pemilu 2014 PPP kembali meraih suara 6, 53% dengan perolehan 39 kursi DPR.

**Tabel 1.5.<sup>3</sup>**

**Perbandingan Perolehan Suara PPP pada Pemilu Era Reformasi**

No	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
----	-------------	-------------	-------------	-------------

<sup>3</sup> Tim Litbang Kompas, *Partai Partai Politik Indonesia*, h 162 5

<sup>3</sup> Pemilihan Umum Presiden Indonesia Era Reformasi, Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan Umum Presiden Indonesia Era Reformasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_Era_Reformasi), Diakses Pada Tanggal 02/12/2014



1.	11.329.905 58 Kursi (12,60%)	9.248.764 58 Kursi (8,15%)	5.533.214 38 Kursi (5,33%)	8.157.488 39 Kursi (6,53%)
----	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

### Partai Persatuan Pembangunan Dalam Pemilu Tahun 2014

PPP memang masih cukup diperhitungkan dalam kancah politik tanah air. Meski tidak terlalu menggembirakan namun prestasi PPP dalam pemilu 2014 patut diapresiasi, karena sebelumnya beberapa lembaga survei telah memperkirakan tentang posisi partai Islam yang diprediksikan akan tutup buku dalam pemilu 2014. Namun pada saat banyak pengamat pesimistis PPP mampu menunjukkan eksistensinya kembali.

Sebagaimana telah dijelaskan dari hasil wawancara penulis. Faktanya sebelum pemilu suara PPP menurun, paska pemilu dibuktikan hasilnya menurun tetapi adanya kekeliruan dari hasil survei tersebut. Banyak yang menduga hasil survei PPP tidak akan lolos Parliamentary Threshold (PT) artinya tidak lagi ikut menjadi peserta pemilu, namun nyatanya pada pemilu 2014 PPP mendapat 6,53% berbeda dengan hasil survei. Secara umum suara partai Islam memang mengalami adanya penurunan.<sup>3</sup>

Dalam pemilu 2014 perolehan suara PPP naik dibandingkan dengan pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, PPP memperoleh 8.157.488 suara atau 6,53% yang setara dengan 39 kursi DPR. Namun dengan adanya perdebatan dalam hal kedudukan kursi pimpinan, hingga terjadi adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi DPR.

Ada beberapa hal yang menyebabkan PPP tidak menempati kursi pimpinan DPR diantaranya. *Pertama*, karena munculnya Partai Demokrat dengan membawa kekuatan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan PPP. *Kedua*, adanya konflik internal PPP yang sedang berjalan. *Ketiga*, PPP memiliki hak akan kursi pimpinan DPR namun PPP menyerahkan kursi DPR kepada Partai Demokrat karena itu merupakan posisi aman pada saat PPP sedang tidak solid.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, jabatān sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

<sup>3</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, jabatān sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

## Ade Hikmatul Fauziah

Lain halnya dengan hasil yang dapat penulis simpulkan dari wawancara pihak Romahurmuziy. Bahwa saat karya tulis ini dibuat, posisi PPP dalam kursi pimpinan DPR belum final terkait adanya konflik internal partai, karena adanya beberapa komisi yang sampai saat ini masih bernegosiasi untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR, sehingga PPP optimis untuk mendapatkan hak kursi pimpinan DPR. Kecuali bagi komisi yang sudah resmi diputuskan dan dilantik untuk menduduki kursi pimpinannya.<sup>3</sup>

Pemilu diselenggarakan untuk memenuhi amanat rakyat dan merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi, yang tidak ikut pemilu hingga menolak sama halnya dengan menolak pembangunan dan anti demokrasi.

Seiringan dengan perjalanan Era Reformasi, golongan putih (golput) dalam arti penolakan dan pengingkaran terhadap pelaksanaan pemilu secara formal sebagai gerakan memang tidak ada atau setidaknya tidak tampak. Akan tetapi jika mengamati pelaksanaan tiga kali pemilu pada masa reformasi ada kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat menurun dalam partai Islam, yaitu pemilu 1999 (35,95%), 2004 (37,74%), 2009 (28,62%) dan 2014 (31,41%). Dengan kata lain secara substansial golput sebetulnya tetap ada dan nyata.<sup>4</sup>

Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis bersama Akhmad Gozali Harahap, bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyampaikan aspirasi suaranya meskipun itu bagian dari hak konstistusional mereka sebagai masyarakat, tetapi partisipasi menunjukkan dari kesadaran terhadap proses berlangsungnya demokrasi, karena masyarakat menganggap bahwa memilih atau tidak, tidak akan dapat merubah kehidupannya. Itu sebagai anggapan bagi masyarakat yang tidak memilih.

Oleh karenanya, bagi yang sudah memiliki hak suara untuk memilih, harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mengurangi golput dalam setiap pemilu yang berlangsung. Dengan demikian akan dapat memberikan harapan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk kembali mempergunakan hak pilihnya secara sadar, dan penuh tanggungjawab.

Begitupun potensi untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada PPP masih ada dan sangat besar, karena kehadiran

---

<sup>3</sup> Wawancara Penulis dengan Nur Salam AS, jabatan sebagai staff ahli dari Amir Uskara dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014

<sup>4</sup> Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, (Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013, h. 58

PPP di kalangan masyarakat Islam Indonesia tidak mudah untuk dihilangkan sejak kelahirannya pada tahun 1973. Kepercayaan yang merupakan kunci bagi keberhasilan perjuangan politik, kunci bagi keberadaan dan peranan PPP dalam memperjuangkan '*izzul Islam wal muslimin*, menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, membangun masyarakat Indonesia yang *marhamah*, serta NKRI sebagai *baldatun wa rabbun ghafur*;<sup>4</sup>

1

### **Sikap Politik PPP Dalam Suksesi Kepemimpinan Negara**

Bagi PPP yang telah mengikuti pemilu delapan kali sejak 1977, maka pemilu 2014 memiliki makna yang lebih strategis, tidak hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang ditegakkan, akan tetapi pemilu 2014 mengandung nilai perspektif bagi peran PPP dalam menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>4</sup>

Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis, akan sikap politik PPP yang sesungguhnya berdasarkan pada garis besarnya pada "*amar ma'ruf nahi mungkar*."<sup>4</sup>

Pada pemilihan umum 2014, diikuti oleh dua calon Presiden dan wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dari Koalisi Merah Putih, serta Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla dari Koalisi Indonesia Hebat.

Saat Koalisi terbentuk, Partai Persatuan Pembangunan mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan di internal partai berlambang Ka'bah tersebut. Polemik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berawal dari kedatangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam kampanye akbar Partai Gerindra di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 23 Maret 2014. Menurut kubu Romahurmuziy, kehadiran Suryadharma Ali untuk mendukung Prabowo adalah keputusan sepihak tanpa melalui prosedur parpol, sehingga menimbulkan polemik di lapisan kader PPP di mana Prabowo tidak masuk dalam satu di antara delapan bakal capres yang ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di

---

<sup>4</sup> Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, h.74 <sup>1</sup>

<sup>4</sup> Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, h. 24 <sup>2</sup>

<sup>4</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

## Ade Hikmatul Fauziah

Bandung.

Pada tanggal 12 Mei 2014, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaksanakan rapat pimpinan nasional yang akhirnya resmi memutuskan arah koalisinya ke Prabowo *Subianto*. Keputusan koalisi PPP ke Prabowo dilakukan secara musyawarah mufakat yang melibatkan 33 Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

Sebagaimana penjelasan yang telah disimpulkan dari hasil wawancara penulis bersama Akhmad Gozali Harahap selaku pihak Suryadharma Ali mengatakan, bahwa partai PPP melihat Prabowo yang paling tepat untuk memimpin, karena dalam diri Prabowo terdapat jiwa pemimpin, dan dinilai memiliki sikap kepemimpinan yang kuat dalam memimpin negara, dibandingkan kepemimpinan Joko Widodo.

Berdasarkan penjelasan dari pihak Romahurmuziy bersama Nur Salam AS, dari hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa pada pemilu 2014 secara resmi organisasi PPP mengambil sikap untuk memilih Prabowo Hatta pada nomor urut satu. Namun setelah pelantikan Presiden terpilih Jokowi Widodo dengan wakil presiden Jusuf Kalla, maka PPP mendukung pemerintahan terpilih.

Pemilu 2014 secara prosedural sudah berjalan secara demokrasi akan tetapi substansi dari tujuan demokrasi yang sesungguhnya belum maksimal, karena masih banyak terjadi adanya pelanggaran hukum.<sup>4</sup> Bagi PPP kepemimpinan pada pemilu 2014 menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia. Secara keseluruhan berjalan dengan lancar, cukup kondusif, dan berhasil membuka dinamika baru di dunia perpolitikan yang ditandai dengan hadirnya dua pasangan caleg yang memiliki perpaduan politik. Namun pada saat yang bersamaan terjadi adanya kekurangan, tetapi pada dasarnya hal tersebut dikatakan sebagai jalan akan adanya perbaikan dimasa yang akan datang.<sup>4</sup>

Maka dalam demokrasi, siapapun yang mendapat kepercayaan dan dipilih oleh rakyat, harus senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Jika ruang pertanggungjawaban tidak ada, maka bisa dikatakan tidak ada demokrasi dan pemerintahannya pun bukan

---

<sup>4</sup> Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_Umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2014](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014), Diakses Pada Tanggal 02/12/2014

<sup>4</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

<sup>4</sup> Wawancara Penulis dengan Nur Salam AS, jabatan sebagai staff ahli dari Amir Uskara dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014

pemerintahan yang demokratis.

Di dalam demokrasi, pemilu merupakan suatu keniscayaan sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Setiap warga berhak mengikuti pemilu, memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara bebas, rahasia, dan pelaksanaannya pun dilakukan secara jujur dan adil.<sup>4</sup>

### **Konflik Internal dan Kelompok Kepentingan**

Pada saat karya tulis dibuat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang dilanda konflik internal. Aksi saling pecat yang terjadi bisa menjadi bumerang yang kontra produktif bagi keberlangsungan partai berlambang Ka'bah tersebut. Bukan tak mungkin PPP akan ditinggal pemilihnya bila konflik antar elitnya itu berlarut-larut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Akibatnya, konflik kembali menyeruak di internal. Rapat pengurus harian (RPH) DPP PPP pada Rabu (10/9/2014) memutuskan memecat Suryadharma Ali dari Jabatan ketua umum. Pemecatan itu dilakukan karena Suryadharma Ali tidak segera mundur meski menjadi tersangka kasus dugaan korupsi haji.<sup>4</sup> Padahal dalam ketentuan AD ART PPP, ketua umum dapat diberhentikan hanya pada saat muktamar berlangsung, bukan disaat rapat-rapat harian, selain dilakukan dengan tanpa adanya paksaan.<sup>4</sup>

Keputusan ini diambil karena Suryadharma Ali dinilai telah meruntuhkan citra partai, sehingga ia pun "diusir" paksa dari kursinya. Tidak terima, Suryadharma Ali bermanuver balik dengan memecat tiga pengurus PPP, yakni Sekretaris Jenderal DPP PPP M. Romahurmuzyi, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa dan Emron Pangkapi.

PPP terlahir atas prinsip bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* sebagai semangat perjuangan PPP. Prinsip perjuangan itu harus bercermin, dan menjunjung tinggi nilai kebenaran dengan melawan hal yang *mungkar*. Pemimpin dari sebuah negara harus memiliki kredibilitas, harus jujur, dan bersih demi kepentingan rakyat

---

<sup>4</sup> Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, h.23 <sup>7</sup>

<sup>4</sup> Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_Umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2014](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014), Diakses Pada Tanggal 02/12/2014

<sup>4</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

bersama.”<sup>5</sup>

0

Saat karya tulis ini dibuat, Partai Persatuan Pembangunan terbagi menjadi dua kubu yang mendukung keputusan Suryadharma Ali untuk menjalin koalisi dengan Prabowo dan kubu Romahurmuziy yang menjalin koalisi dengan Jokowi. Seringnya konflik internal yang melanda PPP ini terjadi karena tidak adanya tokoh sentral yang dapat diterima oleh seluruh anggota partai. Hal ini berbeda dengan partai lain yang memiliki tokoh sentral, seperti Partai Demokrat yang memiliki Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP mempunyai Megawati Soekarnoputri, di Partai Gerindra ada Prabowo Subianto, ataupun di PKS ada Hilmi Aminuddin. Masing-masing tokoh sentral tersebut mampu mengeliminasi potensi konflik yang muncul. Suryadharma Ali yang sebenarnya sudah cukup lama memimpin PPP dinilai belum menjadi tokoh sentral yang kuat. Apalagi posisinya saat ini melemah dengan status barunya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Kini dengan terbentuknya tokoh sentral dalam Majelis Syariah PPP yang diketuai oleh KH. Maimun Zubair, beliau mengusulkan adanya Mukhtar VIII PPP dipercepat dan berujung islah untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka'bah. Maimun menyebutkan salah satu solusinya adalah islah, namun islah hanya bisa dilakukan jika kedua belah pihak tidak membahas apa penyebabnya. Sebab masing-masing pihak akan merasa dirinya benar. Sebagaimana kesimpulan dari hasil wawancara penulis dengan kubu Suryadharma Ali.

Tokoh-tokoh senior PPP yang didalamnya terdapat Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Pakar Partai, Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah terdapat para ulama PPP. Sesungguhnya semua itu sudah maksimal dalam mengupayakan untuk adanya islah pada kedua kubu. Ulama besar KH. Maimun Zubair sudah sangat menginginkan untuk PPP bersatu kembali.<sup>5</sup>

1

Berdasarkan penjelasan pihak kubu Romahurmuziy dapat penulis simpulkan, bahwasanya tokoh senior dan ulama PPP memiliki andil dalam mengupayakan agar konflik segera berakhir, dan kembali membawa nama besar partai Islam. Namun karena konflik telah masuk diranah hukum dan sebagai masyarakat yang taat akan hukum, maka harus menghargai proses hukum yang telah berjalan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan Nur Salam AS, Jabatan sebagai staff ahli dari Amir Uskara dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan Nur Salam AS, jabatan sebagai staff ahli dari Amir

Dalam partai politik PPP telah terbentuk suatu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai sebagai salah satu institusi PPP tingkat nasional yang dibentuk pada muktamar PPP VII/2011 di Bandung untuk melaksanakan amanah UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Di dalam pasal 32 UU No.2/2011 dengan tegas dinyatakan bahwa perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Putusan Mahkamah Partai DPP PPP bersifat final dan mengikat (pasal 20 Ayat 6 AD PPP jo Pasal 32 Ayat 5 UU No. 2/2011)<sup>5</sup>. Sejak Mahkamah Partai dibentuk telah masuk permohonan penyelesaian perselisihan internal partai. Seperti perselisihan diantara kedua kubu yang saling memperebutkan kursi pimpinan PPP. Maka sebelum memasuki sidang Mahkamah Partai senantiasa dilakukan mediasi untuk mencapai islah.<sup>5</sup>

Sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh pihak Suryadharma Ali dalam hasil wawancara penulis dapat disimpulkan. Peran Mahkamah Partai sudah berjalan maksimal, saat itu juga Mahkamah Partai bersidang berhari-hari kemudian memutuskan sejumlah keputusan. *Pertama*, kedua kubu untuk melakukan islah. *Kedua*, kepemimpinan PPP tetap dipegang oleh Suryadharma Ali dengan Sekjen Romahurmuziy, dan *ketiga*, Mahkamah Partai memberikan waktu satu minggu pada kedua kubu untuk islah.<sup>5</sup>

Mahkamah Partai, dan Majelis Syariah mempunyai peran penting dalam posisi keberadaannya di dalam partai. Salah satunya adanya upaya meredam konflik seperti saat ini yang perlu diselesaikan, dengan memberikan masukan, bantuan untuk penyelesaian masalah, memberi arahan, saran-saran, bukan dengan memberi intruksi baru.<sup>5</sup>

Pada Selasa, 23 September 2014 lalu, Mahkamah PPP menggelar rapat internal di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta. Rapat yang di pimpin oleh ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy itu untuk menyikapi perpecahan kedua kubu diinternal PPP. Mahkamah Partai telah memutuskan untuk memberikan waktu satu minggu untuk keduanya

---

Uskara dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014

<sup>5</sup> *Putusan Mahkamah Partai PPP Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Bersifat Final Dan Mengikat.*

<sup>5</sup> Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, h.121<sup>4</sup>

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17 Februari 2014.

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan Nur Salam AS, Jabatan sebagai staff ahli dari Amir Uskara dari pihak Romahurmuziy, Jakarta. 20 Februari 2014.

## **Ade Hikmatul Fauziah**

melakukan islah. Dan menyatakan bahwa pemberhentian oleh masing-masing pihak tidak sah, dan meminta Suryadharma Ali serta Romahurmuziy menentukan waktu dan tempat Muktamar VIII.

Namun hal itu tidak tercapai, karena pihak Romahurmuziy menggelar Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014, sebelum habis masa islah yang telah ditentukan oleh Mahkamah Partai. Muktamar ini menghasilkan kepengurusan dengan ketua umum Romahurmuziy. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2014 Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan PPP yang diajukan pihak Romahurmuziy.

Pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 kubu Suryadharma Ali menggelar Muktamar VIII di Jakarta atas usulan dari Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimun Zubair untuk mengatasi konflik internal partai berlambang Ka'bah. Hasilnya Djan Faridz terpilih menjadi ketua umum. PPP kubu Djan faridz mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy. Hasilnya pada November 2014 PTUN mengeluarkan putusan sela yang meminta pelaksanaan SK Menkumham RI Nomor M.HH 07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014 ditunda. Artinya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly diwajibkan untuk menunda pengesahan kepengurusan DPP PPP.

Melalui wawancara dengan pihak Romahurmuziy dapat penulis simpulkan. Bahwa suatu cobaan dalam sebuah partai PPP, karena upaya islah sudah dilakukan, namun nampaknya kedua pihak lebih merasa nyaman apabila menyelesaikan secara hukum, proses hukum sudah berjalan dan arus dihormati, karena hukum yang memberikan jalan keputusan final.

Keluarnya putusan sela atas permohonan pihak Suryadharma Ali oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dinilai sebagai momentum tepat untuk melakukan upaya islah bagi dua kubu di PPP yang tengah berseteru terkait keabsahan kepengurusan DPP PPP pihak Romahurmuziy.

Berdasarkan wawancara dari pihak Suryadharma Ali dapat penulis simpulkan, bahwa masih ada harapan bagi PPP untuk tetap bersatu karena proses pengadilan sudah berjalan. Hingga tim islah sudah terbentuk, namun tim islah belum bisa menyatukan PPP, maka proses hukum yang akan menentukannya siapa yang benar dan yang salah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara Penulis dengan Akhmad Gozali Harahap, Jabatan sebagai wakil Sekretaris Jenderal masa bakti 2011-2015 dari pihak Suryadharma Ali, Jakarta. 17



Majelis Hakim PTUN yang mengabulkan gugatan mantan ketua umum Suryadharma Ali tanggal 25 Februari 2015 pada dasarnya menilai gugatan yang diajukan pihak Suryadharma Ali adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yaitu Menkumham yang dianggap ikut campur dalam konflik internal partai politik. Majelis Hakim kemudian mengabulkan seluruhnya gugatan Suryadharma Ali atau pihak penggugat, dan membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM No M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan DPP PPP pada tanggal 28 Oktober 2014.

Dengan mengabulkan gugatan Suryadharma Ali terkait pengesahan Menkumham terhadap kepengurusan PPP pihak Romahurmuziy. PPP pihak Romahurmuziy resmi mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) pada tanggal 2 Maret 2015. Serta Menkumham Yasonna H. Laoly pun turut mengajukan banding atas putusan tersebut. Yasonna menganggap bahwa banding adalah upaya pemerintah mengintervensi kepengurusan partai politik. Anggapan tersebut muncul karena pihak Romahurmuziy mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sementara Djan Faridz memilih untuk oposisi.<sup>5</sup>

8

Pengabulan gugatan pemohon atas Surat Keputusan (SK) Menkumham terkait pengesahan pengurus PPP versi muktamar Surabaya berimplikasi pada penundaan pelaksanaan SK Menkumham.

Penulis akhirnya membatasi penelitian sampai dengan adanya keputusan dari PTUN yang mengabulkan gugatan dari pihak Suryadharma Ali dalam konflik internal PPP pada tanggal 25 Februari 2015. Namun sampai karya tulis ini dibuat, keputusan itu belum final dan masih berjalan dalam proses hukum karena adanya pengajuan banding dari pihak Romahurmuziy serta Menkumham Yasonna H. Laoly.

## Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah adanya peran Partai Persatuan Pembangunan dalam membawa aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan asas Islam.

Dalam hal suksesi kepemimpinan pada pemilu 2014, PPP

---

Februari 2014.

<sup>5</sup> Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, [Http://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_Indonesia_2014), Diakses Pada Tanggal 02/12/2014

## Ade Hikmatul Fauziah

memiliki strategi mengedepankan isu bahwa PPP telah kembali ke fitrah dan berjuang untuk mengisi kehidupan bangsa dengan nilai-nilai akhlakul karimah, serta memperjuangkan kehidupan bangsa yang demokratis.

Dalam hal pertikaian internal yang terjadi di tubuh PPP, maka sikap elit politik atas PPP perlu mengedepankan adanya ishlah dan kembali kepada tujuan awal perjuangan partai. Jalan tengah yang dapat diambil bukannya perebutan kekuasaan partai, tetapi menyadari pentingnya persatuan dan kebersamaan untuk menuju cita-cita bersama.

Dalam hal pemilu 2014 PPP menyadari bahwa PPP harus memiliki makna yang lebih strategis, tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan pemerintahan yang ditegakkan, tetapi mengandung nilai perspektif bagi peran PPP guna menegakkan kepemimpinan bangsa, menuju terwujudnya nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## Pustaka Acuan

- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik: Pasca Soeharto*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam Dan Umatnya*, Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1983.
- Budiman, Ahmad, *Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, Dalam Sali, Ed., Susiana, Pemilu 2004 : Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi*, Jakarta: Tiga Putera Utama, 2003.
- Chumaidy, Chozin, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, (Jakarta. DPP PPP, Cet.1 Tahun 2013.
- Darwis, Fernita, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011, Cet. 1.
- Effendy, Bahtiar, *Islam Politik Pasca Soeharto Di Indonesia, Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat III, No. 5*, Agustus 2003.
- Feith, Herbert, *The Decline Of Constitutional Democracy In Indonesia*.
- Ketetapan Mukhtar VI Partai Persatuan Pembangunan, *Tentang Khittah Dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan*, Jakarta, 2007.
- Panduan Parlemen Indonesia, Jakarta: Yayasan API, 2001.
- Ranuwihardjo, A. Dahlan, *Pergerakan Pemuda Setelah Proklamasi Beberapa Catatan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979.
- Rosyada, Dede, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media,

2003.

- Salim, Arsekal, *Partai-Partai Islam Dan Relasi Agama Negara*, Jakarta: Puslit IAIN, 1999.
- Siddiq, M Dja'far, *PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru*, Jakarta, 2003.
- Sumarno, *Megawati Dan Aspirasi Politik Islam*, dalam Rusdi Muhtar Dkk, *Megawati Soekarno Putri: Presiden Republik Indonesia*, Jakarta: Rumpun Dian Nugraha, 2002.
- Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru: Perubahan Politik Dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993, Cet.1.
- Tim Litbang Kompas, *Partai Partai Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 1999.
- Umar, Musni, *Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Kemenangan Abangan dan Sekuler*, Jakarta: Insed Bersama Lembaga Pencegah Korupsi, 2004, Cet. 1.
- Wilopo, *Zaman Pemerintahan Parai-Partai Dan Kelemahan-Kelamahannya*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976.

**Ade Hikmatul Fauziah**